

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Handoko A Hasthoro

Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (SIA) yang ada pada organisasi pemerintah daerah tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengujian ini menggunakan lima faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Kelima faktor yang diuji adalah keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan tehnik personel sistem informasi, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, dan formalisasi pengembangan sistem apakah ada hubungan dengan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi.

Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari segi kepuasan pemakai maupun dari atribut pemakaian sistem. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan tehnik personal sistem informasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari atribut kepuasan pemakai maupun atribut pemakaian sistem. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ukuran organisasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari atribut kepuasan pemakai maupun atribut pemakaian sistem. Dukungan manajemen puncak mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut kepuasan pemakai, sedangkan atribut pemakaian sistem tidak. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor formalisasi pengembangan sistem dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari atribut kepuasan pemakai maupun atribut pemakaian sistem.

Kata kunci : Organisasi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Pengembangan Sistem Informasi, Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan bahwa semua level pemerintahan di wilayah hukum Republik Indonesia untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Surplus Defisit, Laporan Posisi Keuangan / Neraca, dan Laporan Aliran Kas yang kemudian disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika mengingat historisnya, laporan keuangan pemerintahan disusun berdasarkan basis kas (*cash basic*) yang mana pendapatan dan biaya diukur hanya berdasarkan kas diterima dan kas dikeluarkan. Dalam standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005), laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan basis waktu (*accrual basic*). Penerapan *accrual basic* ini membutuhkan waktu transisi, karena penataan sistem akuntansi tidak bisa dilakukan langsung.

Disamping itu di kebanyakan pemerintah daerah pencatatan akuntansi masih menggunakan sistem *single entry*. Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan secara tunggal atau tidak berpasangan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada posisi penerimaan dan transaksi yang berakibat pada berkurangnya kas akan dicatat sebagai pengeluaran. Pada praktik yang berjalan di pemerintah daerah selama hampir tiga dekade, pencatatan ini dipraktikkan, contohnya dalam Buku Kas Umum (Afiah, 2009). Sistem tata buku tersebut merupakan bagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Disamping itu sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem *double entry*.

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri dan sisi kredit di sebelah kanan. Setiap pencatatan kedua sisi harus seimbang, sehingga keseimbangan tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu : $\text{aktiva/aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas}$. Dalam PP No. 24 tahun 2005 setiap pemerintah daerah sudah dianjurkan untuk menggunakan sistem ini.

Pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Keterlibatannya secara langsung dalam proses pembangunan di masyarakat, menjadikan insitusi ini berperan secara strategis. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penanganan yang serius dalam pengelolaan pemerintah daerah. Dikeluarkannya perundangan baru mengenai

masalah otonomi daerah semakin mendorong profesionalisme pemerintah daerah, salah satunya dalam masalah keuangan daerah.

Fungsi *stewardship* pemerintah daerah sendiri diperoleh dari masyarakat, karena dari merekalah baik wewenang untuk melaksanakan pemerintahan maupun sumber daya untuk menjalankan pemerintahan, dapat diperoleh. Oleh karena itu, tanggungjawab pemerintah daerah juga seharusnya dititikberatkan pada masyarakat, bukan semata-mata pertanggungjawaban *vertical* seperti yang terjadi pada masa orde baru. Yang menjadi permasalahan adalah diperlukannya teknologi informasi yang sesuai untuk itu. Karena berbeda dengan sektor swasta, pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengadopsi sistem akuntansi swasta dalam melaksanakan pelaporan anggarannya. Karena itu, diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah, sekaligus mampu mengemban misi pertanggungjawaban ganda.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan atas sekelompok manusia yang hidup bersama-sama dalam masyarakat dan untuk menyediakan dan membiayai jasa-jasa tertentu. Di Indonesia sendiri, pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dibagi lagi kedalam daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua. Kebijakan yang diambil didalam pemerintah daerah itu merupakan kunci sukses dari pembangunan, karena didaerahlah pembangunan itu langsung dapat dirasakan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pemerintahan pusat yang terlebih banyak mengurus masalah administratif.

Sebenarnya, pemerintah daerah merupakan pelayan dari masyarakat, karena kekuasaan mereka untuk menjalankan pembangunan merupakan wewenang yang diperoleh dari rakyat. Demikian pula dana yang mereka dapatkan, adalah merupakan uang rakyat. Karena itu, mestinya prioritas utama dari pemerintah daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki bermacam-macam peranan. Richard Musgrave (Khotimah,2003), telah mengidentifikasi tiga fungsi ekonomi untuk pemerintah daerah. Fungsi tersebut adalah stabilisasi, distribusi dan alokasi.

Fungsi stabilisasi menunjukkan peran Pemda dalam tetap menjaga adanya lapangan pekerjaan, kestabilan harga. dan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan kebijakan fiskal dan moneter. Peran yang pertama ini ternyata belum bisa dipenuhi oleh pemerintah di Indonesia, dengan bukti-bukti yang semakin nyata dalam kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, serta nilai mata uang yang tidak stabil yang menjurus ke arah hiperinflasi telah menyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Hal ini tentunya harus segera diatasi atau kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan menjadi pudar.

Fungsi kedua adalah distribusi. Yaitu peranan pemerintah daerah dalam menjaga dan menyeimbangkan sumber daya dan pendapatan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena itu, hal yang patut mendapat perhatian serius adalah

bagaimana supaya kesenjangan yang terjadi di Indonesia, dalam berbagai bidang, dapat segera diatasi agar tidak menjurus ke arah disintegrasi bangsa seperti yang disinyalir akhir-akhir ini. Kesenjangan tersebut menjadi memuncak pada masa pasca reformasi, dimana daerah-daerah yang potensial dan telah menyumbang pemasukan besar bagi negara kita menjadi tidak puas dengan distribusi yang mereka dapatkan. Kenyataannya, daerah-daerah tersebut memang lebih banyak dikuras alamnya daripada diperhatikan tingkat kemajuan pembangunan daerahnya. Prosentase keuangan Indonesia, dimana hampir 60% uang beredar di Jakarta juga merupakan indikasi belum berjalannya fungsi distribusi di Indonesia.

Fungsi ketiga adalah fungsi dimana Pemda berkewajiban untuk menjaga persaingan sehat dan menyediakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi secara efisien oleh sektor swasta. Seringkali peranan ini disalahgunakan, sehingga yang ada dalam kenyataan adalah adanya praktek monopoli yang jauh dari efisien, bahkan merugikan negara dan masyarakat. Pengelolaan BUMN yang tidak memadai menjadikan badan usaha tersebut lebih menjadi ajang korupsi dan kolusi, daripada badan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Perubahan sistem politik dan sosial kemasyarakatan akibat arus deras reformasi telah menuntut pengelolaan pemerintahan untuk lebih baik (*good government governance*). Tuntutan akan transparansi publik, kinerja yang baik, akuntabilitas yang tinggi telah membawa para manajer pemerintahan daerah untuk mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Untuk itu pemerintah daerah memerlukan ahli penyedia informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan pengambil keputusan yang lain agar memungkinkan mereka mengalokasikan berbagai sumber daya ekonomis pemerintahan daerah. Kebijakan *good government governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh organisasi pemerintahan, yang disadari hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan media dan proses untuk mewujudkannya (Bastian dan Soepriyanto, 2003)

Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi mencakup pula kewenangan yang penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi. Dengan demikian, hal ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup pula kewenangan dalam penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat, maupun yang berasal dari pemerintah daerah sendiri.

Mekanisme kontrol dapat dibentuk secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal, pengawasan dilaksanakan oleh pusat, selaku koordinator utama pembangunan. Namun pengawasan ini saja tidak mencukupi. Rakyat selaku konsumen utama dari pelayanan Pemda haruslah berperan sebagai pihak pengawas, karena merekalah yang bisa merasakan kondisi daerah dan kinerja Pemdanya. Oleh karena itu, Pemda berkewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban ganda.

Kebutuhan akan pertanggungjawaban ganda ini juga merupakan konsekuensi logis dari penetapan UU otonomi daerah yang baru, yang mengandung ketentuan mengenai misi pembangunan daerah yang harus diemban oleh Pemda, yaitu :

1. Efisiensi dan Efektifitas dalam pengelolaan sumber daya daerah.
2. Perbaikan kualitas dalam pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
3. Penyertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Belum semua pemerintah daerah sudah menerapkan PP No.24 Tahun 2005. Tuntutan untuk mengimplementasikan aturan tersebut memang membutuhkan waktu yang lama. Selama ini informasi keuangan yang dibutuhkan para *stakeholder* pemerintah daerah belum memadai. Sehingga pengembangan sistem (terutama sistem informasi akuntansi) di organisasi pemerintah daerah adalah hal mutlak untuk dilakukan.

Disamping itu, perkembangan teknologi saat ini semakin maju dan canggih, terutama teknologi komunikasi. Akuntansi sebagai salah satu bahasa bisnis/pelayanan tidak terlepas dari dampak perkembangan tersebut. Dalam proses akuntansi, pengolahan data merupakan tahapan yang sangat vital di dalam menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Dewasa ini perkembangan teknologi turut mendorong perkembangan pengolahan data.

Pada organisasi pemerintahan kinerja sistem informasi akuntansi yang baik (dengan dukungan teknologi) akan memberikan kualitas pelayanan yang baik pula. Laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih bisa dipercaya kebenarannya serta dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah sistem informasi akuntansi pada pemerintah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memenuhi kebutuhan pemakai sebagai dasar bagi pengambilan keputusan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mencoba mengungkap faktor-faktor pengembangan sistem yang ditengarai mempunyai hubungan dengan kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana pada organisasi pemerintah di

daerah tersebut ada yang sudah menerapkan PP No.24 Tahun 2005 dan ada yang belum menerapkan.

2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kesatuan yang terstruktur dalam suatu organisasi yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain untuk mengubah data ekonomi menjadi suatu informasi akuntansi untuk menyediakan informasi bagi *user* yang membutuhkan. Perkembangan teknologi informasi memiliki peran yang signifikan bagi pengembangan sistem informasi di organisasi. Dengan bantuan teknologi, sistem informasi akan berjalan dengan lebih baik karena teknologi dapat membantu melaksanakan pekerjaan dengan cepat, akurat, dan konstan.

Pada organisasi sektor publik (pemerintahan), sistem informasi akuntansi juga sudah berkembang dan teraplikasi di berbagai daerah. Sistem pembukuan/akuntansi yang digunakan pada awalnya adalah *single entry* dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya *good governance* yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi sektor publik, perubahan dari sistem *single entry* menjadi *double entry* dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. *Single entry* memang relatif mudah dan sederhana, akan tetapi alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan. Sementara pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem *double entry* ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang *auditable* dan *traceable*. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem *double entry* maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat (Mardiasmo, 2002)

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang memadai dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang baik. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. Sebagian dari *output* yang diperlukan oleh pemroses informasi disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi, seperti laporan keuangan dari pemrosesan transaksi. Namun sebagian besar diperoleh dari sumber lain baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

PP No. 24 Tahun 2005 dibuat untuk menjawab tantangan bagi penyediaan informasi keuangan yang memadai kepada para pemangku kepentingan pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang

independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pada organisasi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terutama mengukur mengenai 3 hal, yaitu masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. *Pengakuan* dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. *Pengukuran* adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai normal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi lebih dulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. *Pengungkapan* adalah upaya menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, pada organisasi pemerintahan perlu dikembangkan sistem informasi akuntansi. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari berbagai subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang lebih besar. Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima (5) komponen:

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi / institusi.
3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan

Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu (Romney, 2006):

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan handal.

Sistem Informasi Akuntansi yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun, baik bisnis maupun non-bisnis. Tanpa perangkat untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi, tidak akan ada cara untuk memutuskan seberapa baik kinerja organisasi. Setiap organisasi juga perlu menelusuri pengaruh-pengaruh berbagai aktivitas atas sumber yang berada di bawah pengawasannya. Informasi tentang para pelaku yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut penting untuk menetapkan tanggungjawab dari tindakan yang diambil. Di dalam standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Oleh sebab itu, akuntansi merupakan proses identifikasi, pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi.

Sebagai aktivitas pendukung, Sistem informasi akuntansi dapat memberi nilai tambah bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga aktivitas bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal tersebut dengan cara:

1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa.
2. Memperbaiki efisiensi
3. Memperbaiki pengambilan keputusan

4. Berbagi pengetahuan

Dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi peran teknologi sangat penting. Teknologi informasi yang meliputi komputer dan telekomunikasi memungkinkan (*enable*) organisasi mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, dan melaporkan serta mendistribusikan informasi kepada para pemakai dengan *cost* yang lebih rendah. Teknologi informasi juga memungkinkan organisasi menangkap dan menanggapi informasi eksternal secara efektif. Organisasi dimungkinkan memiliki informasi secara tepat waktu dan beberapa bentuk pelaporan tepat waktu kepada para *stakeholders*. Teknologi informasi masa depan akan menyebabkan model aliran informasi menjadi maju dan disajikan secara virtual. Sehingga teknologi informasi akan memberikan dampak bagi kinerja sistem informasi akuntansi yang akan dikembangkan.

Sistem informasi akuntansi suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal lain yang juga penting adalah sistem informasi harus mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan, maupun non-keuangan dari aktivitas-aktivitas organisasi. Sistem informasi akuntansi harus dapat menyediakan informasi operasional terperinci tentang kinerja organisasi. Baik ukuran keuangan maupun data operasional/aktivitas seringkali dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kinerja dengan tepat dan lengkap.

Sebagian besar dokumen sumber mencatat baik data keuangan maupun operasional dari suatu transaksi. Kuncinya adalah mendisain sistem informasi akuntansi agar kedua jenis data tersebut disimpan sedemikian rupa hingga dapat memfasilitasi integrasi keduanya dalam laporan. Dahulu, sebagian besar sistem informasi akuntansi gagal dalam masalah ini karena sebelumnya didisain untuk mendukung persiapan laporan keuangan, bukan untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen internal. Akuntan perusahaan juga harus mengetahui cara untuk mengatur kembali data dari hasil internal yang telah ada sebelumnya, dan menyajikannya sedemikian rupa hingga membuka pandangan baru atas hasil-hasil operasi organisasi. Sebagai contoh inovasi, salah satu cara organisasi mengukur keberhasilan inovasi adalah dengan melacak dan melaporkan persentase pendapatan yang dihasilkan produk/jasa baru tersebut. Yang juga penting adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber luar, sehingga sistem informasi akuntansi didisain untuk mengintegrasikan data dari eksternal dan internal sedemikian rupa hingga memungkinkan persiapan laporan yang didasarkan pada kedua jenis data tersebut.

Untuk kerapian dan validitas data yang akan diolah menjadi informasi, maka pembuatan database menjadi kebutuhan yang urgen. Sistem database dapat mempengaruhi sifat dasar akuntansi. Contohnya, sistem database dapat mengarah pada ditinggalkannya model akuntansi *double-entry*. Alasan dasar sistem akuntansi berpasangan adalah pengulangan pencatatan jumlah suatu transaksi

sebanyak dua kali, yang berfungsi sebagai alat pemeriksa proses data yang akurat. Setiap transaksi menghasilkan masukan debit dan kredit yang sama besar, kemudian persamaan debit dan kredit diperiksa kembali dengan berbagai cara, dalam suatu proses akuntansi. Akan tetapi, pengulangan data berlawanan dengan konsep database. Apabila jumlah yang berhubungan dengan sebuah transaksi dimasukkan ke dalam sistem database dengan benar, maka jumlah tersebut hanya perlu disimpan sekali saja, bukan dua kali. Proses data terkomputerisasi sudah cukup akurat tanpa harus mempergunakan sistem pemeriksaan dan pemeriksaan ulang, yang merupakan ciri khas dari model akuntansi pembukuan berpasangan.

Sistem database juga memiliki potensi untuk mengubah sifat pelaporan eksternal, secara signifikan. Saat ini banyak sekali waktu dan usaha dilakukan untuk menetapkan bagaimana organisasi seharusnya meringkas dan melaporkan informasi akuntansi ke pemakai eksternal. Mengapa tidak bisa hanya membuat copy mengcopy database keuangan organisasi dan membuatnya dapat diakses para pemakai, sebagai ganti laporan keuangan tradisional? Para pemakai kemudian dapat secara bebas memanipulasi dan menganalisis data mentah dalam bentuk yang mereka inginkan.

Pengaruh sistem database yang paling signifikan mungkin dalam hal cara informasi akuntansi akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Kesulitan merumuskan permintaan khusus dalam sistem akuntansi berdasar pendekatan file atau sistem database yang tidak rasional. Informasi keuangan tersedia hanya dalam format yang belum tetap dan dalam waktu tertentu saja. Akan tetapi, database relasional menyediakan bahasa permintaan yang luas dan mudah dipergunakan. Jadi, para manajer/pemimpin tidak perlu lagi terhalang dengan berbagai cara detail prosedur mengenai cara mendapatkan informasi. Sebagai gantinya, mereka dapat berkonsentrasi hanya untuk menspesifikasi informasi apa yang mereka inginkan. Hasilnya, laporan keuangan dapat dengan mudah dipersiapkan untuk mencakup periode waktu manapun yang ingin dipelajari oleh para manajer/pemimpin, bukan hanya dalam periode yang secara tradisional dipergunakan oleh para akuntan.

Database relasional juga dapat mengakomodasi berbagai pandangan atas suatu fenomena yang sama. Sebagai contoh, tabel-tabel yang menyimpan informasi mengenai aset dapat berisi kolom-kolom yang bukan hanya berdasar biaya historis, tetapi juga biaya penggantian dan nilai pasar. Jadi, para manajer/pemimpin tidak lagi dipaksa melihat data dalam cara yang telah ditetapkan oleh para akuntan. Database relasional menyediakan kemampuan untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional. Melalui cara-cara ini database relasional memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi dalam membuat keputusan yang taktis dan strategis untuk menjalankan organisasi. Akan tetapi, para akuntan harus memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai sistem database agar mereka dapat berpartisipasi dalam mendisain sistem informasi akuntansi di masa mendatang. Partisipasi semacam ini

merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa terdapat pengendalian yang memadai dalam sistem tersebut untuk menjaga keamanan data dan memastikan keandalan informasi yang dihasilkannya.

Baik buruknya kinerja sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari kepuasan pemakai dan pemakaiannya itu sendiri. Menurut Soegiharto (2001) dan Fung Jen (2002) (Dalam Almilia dan Brilliantien, 2007) beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi antara lain : keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan tehnik personel sistem informasi, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pendidikan dan pelatihan pemakai, keberadaan dewan pengarah sistem informasi, dan lokasi departemen/divisi sistem informasi.

Dalam peneitian ini, hipotesis yag diajukan adalah:

- H1: Terdapat hubungan yang positif keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem dengan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi
- H2: Terdapat hubungan yang positif kemampuan tehnik personel sistem informasi dengan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi
- H3: Terdapat hubungan ukuran organisasi dengan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi
- H4: Terdapat hubungan yang positif dukungan manajemen puncak dengan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi
- H5: Terdapat hubungan yang positif formalisasi pengembangan sistem dengan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Almilia dan Brilliantien pada tahun 2007, yang mengambil obyek Bank Umum Pemerintah yang berada di Surabaya dan Sidoarjo. Sedang saat ini Peneliti mencoba menggunakan obyek organisasi pemerintah daerah tingkat II di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah daerah tingkat II se- Indonesia. Sampel yang digunakan adalah organisasi pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Kulonprogo, dan Pemkot Yogyakarta. Kemudian yang dijadikan obyek penelitian adalah pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan sistem informasi akuntansi dengan respondennya pegawai di bagian/unit yang menggunakan sistem informasi akuntansi.

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada responden. Jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 50 kuisioner, masing-masing pemerintah daerah 10 kuisioner (ditujukan kepada pegawai pada Dinas yang mengelola keuangan/akuntansi). Data yang terkumpul dari masing-masing

pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Bantul 9 kuisisioner, untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 8 kuisisioner, Pemerintah Kabupaten Sleman 10 kuisisioner, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 5 kuisisioner, sedangkan pemerintah Kota Yogyakarta 8 kuisisioner.

Pengolahan data yang dilakukan adalah uji kualitas data dengan cara uji validitas dan reliabilitas data. Dalam uji validitas instrumen yang terdiri dari beberapa item dan yang diukur dengan skala ordinal. Setelah itu dilakukan pengujian pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji Korelasi *Pearson Product Moment*. Analisis korelasi adalah suatu analisis statistik yang mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas (*independent variables*) disimbolkan dengan “X” dengan variabel terikat (*dependent variables*) disimbolkan dengan “Y”, dimana hubungan antara dua variabel disebut korelasi bivariat. Pengukuran korelasi bivariat dapat dibedakan menjadi pengukuran secara linear dan berganda (Sunyoto, 2007). Formulasi atau rumusan korelasi adalah sebagai berikut (Budiyuwono, 1995) :

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Atau

$$r = \frac{N \sum f_x d_x d_y - (\sum f_x d_x)(\sum f_y d_y)}{\sqrt{N \sum f_x d_x^2 - (\sum f_x d_x)^2} \sqrt{N \sum f_y d_y^2 - (\sum f_y d_y)^2}}$$

Dimana:

- r = koefisien korelasi
- N = jumlah frekuensi
- X = variabel independen
- Y = variabel dependen
- f_x = frekuensi X
- f_y = frekuensi Y
- dx = deviasi X dan dy = deviasi Y

Pengolahan data yang dilakukan adalah uji kualitas data, uji kualitas data dilakukan dengan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas data. Dalam uji validitas hanya instrumen yang terdiri dari beberapa item dan yang diukur dengan skala ordinal. Sedangkan tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 0,05 atau 5 %.

Pengujian hipotesis dengan *uji pearson product moment* digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dimana pengukurannya menggunakan skala likert. (Almilia dan Brilliantien, 2007)

4. Hasil dan Pembahasan

Jumlah kuisisioner yang disebarkan sebanyak 50 kuisisioner, masing-masing pemerintah daerah 10 kuisisioner (ditujukan kepada pegawai pada Dinas yang mengelola keuangan/akuntansi). Data yang terkumpul dari masing-masing pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Bantul 9 kuisisioner, untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 8 kuisisioner, Pemerintah Kabupaten Sleman 10 kuisisioner, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 5 kuisisioner, sedang pemerintah Kota Yogyakarta 8 kuisisioner. Total dari 50 kuisisioner, yang kembali ada 40 kuisisioner.

Gambaran dari identifikasi responden adalah: Usia responden <40 th sebesar 60%, diatas 40 th 40% . Sedangkan pendidikan responden pada penelitian ini adalah 8 orang SLTA, 9 orang Diploma, 20 orang sarjana, dan 3 orang pasca sarjana. Lama responden yang bekerja 1-5 th 12 orang, 5-10 th 16 orang, 10-15 th 5 orang, dan lebih dari 15 th ada 7 orang. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan adalah SIPKD 8 responden, Myob Accounting 5 responden, Dac Easy Accounting 2 responden, dan Lainnya 25 responden.

Untuk menguji hipotesis, dilakukan dengan menggunakan Uji Korelasi Pearson Product Moment. Ada 5 hipotesis yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, kemampuan tehnik dari personel sistem informasi akuntansi, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, dan formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi dengan kinerja sistem informasi akuntansi.

Untuk mengetahui hubungan tersebut di atas, dilakukan Uji Korelasi Pearson Product Moment, Perhitungan statistik dilakukan dengan software SPSS versi 13 dengan hasil sebagai berikut:

1. Hubungan faktor keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut kepuasan pemakai mempunyai nilai korelasi sebesar 0,118 dengan signifikansi 0,140. hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Sedangkan hubungan faktor keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut pemakaian sistem informasi mempunyai nilai korelasi sebesar -0,126 dengan signifikansi 0,141. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hubungan faktor keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi mempunyai nilai korelasi sebesar 0,138 dengan signifikansi 0,201. hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Bedasar hasil analisis tersebut maka H_0 diterima, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi.
2. Hubungan kemampuan tehnik personal sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi untuk atribut kepuasan pemakai mempunyai nilai korelasi 0,155 dengan tingkat signifikansi 0,263. hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hubungan kemampuan tehnik

personal sistem informasi terhadap kinerja sisten informasi akuntansi untuk atribut pemakaian sistem mempunyai nilai korelasi sebesar 0,181 dengan tingkat signifikansi 0,103. hasil analisis ini lebih besar dari dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Sedangkan hubungan kemampuan tehnik personal sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi mempunyai nilai korelasi sebesar 0,147 dengan tingkat signifikansi 0,219. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Berdasar hasil tersebut maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan tehnik personal sistem informasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi.

3. Hubungan ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut kepuasan pemakai mempunyai nilai korelasi 0,135 dengan tingkat signifikansi 0,241. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hubungan ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi untuk atribut pemakaian sistem informasi mempunyai nilai korelasi sebesar 0,281 dengan tingkat signifikansi 0,106. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Sedangkan hubungan ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi mempunyai nilai korelasi sebesar 0,167 dengan tingkat signifikansi 0,266. hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Berdasar hasil tersebut maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ukuran organisasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi.
4. Hubungan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi untuk atribut kepuasan pemakai mempunyai nilai korelasi sebesar 0,631 dengan tingkat signifikansi 0,002. Hasil analisis ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hubungan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut pemakaian sistem mempunyai nilai korelasi sebesar 0,164 dengan tingkat signifikansi 0,231. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Sedangkan Hubungan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informai akuntansi mempunyai nilai korelasi sebesar 0,422 dengan tingkat signifikansi 0,014. Hasil analisis ini lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Berdasar hasil tersebut, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulakn bahwa dukungan manajemen puncak mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut kepuasan pemakai, sedangkan atribut pemakaian sistem tidak.
5. Hubungan faktor formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut kepuasan pemakai mempunyai nilai korelasi sebesar-0,068 dengan tingkat signifikansi 0,312. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hubungan formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi terhadap

kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut pemakaian sistem mempunyai nilai korelasi sebesar -0,291 dengan tingkat signifikansi 0,102. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Sedangkan hubungan faktor formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi mempunyai nilai korelasi sebesar -0,106 dengan signifikansi 0,600. Hasil analisis ini lebih besar dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Berdasar hasil tersebut maka H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor formalisasi pengembangan sistem dengan kinerja sistem informasi akuntansi.

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari segi kepuasan pemakai maupun dari atribut pemakaian sistem
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan tehnik personal sistem informasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari atribut kepuasan pemakai maupun atribut pemakaian sistem.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ukuran organisasi dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari atribut kepuasan pemakai maupun atribut pemakaian sistem.
4. Dukungan manajemen puncak mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk atribut kepuasan pemakai, sedangkan atribut pemakaian sistem tidak.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor formalisasi pengembangan sistem dengan kinerja sistem informasi akuntansi. Baik dari atribut kepuasan pemakai maupun atribut pemakaian sistem.
6. Kuisioner yang masuk 40 responden dari 50 kuisioner yang dibagi, sehingga hasil ini belum bisa dijadikan tolok ukur yang memadai, ukuran sampel yang lebih besar diduga akan memberi hasil penelitian yang lebih obyektif.
7. Tidak semua pegawai (penerima kuisioner) di pemerintah daerah tingkat II menyerahkan kuisioner, sehingga kesimpulan tidak bisa digeneralisir.

Saran yang diberikan:

1. Penelitian berikut untuk organisasi pemerintahan, hendaknya sasaran responden lebih diperluas lagi ke bagian/unit dimana mereka mengelola keuangan dan menggunakan sistem informasi berbasis tehnologi (komputer).

2. Didalam pengumpulan data hendaknya dilakukan pra survey terlebih dahulu dengan melakukan wawancara dengan pimpinan terkait sehingga bisa lebih diarahkan untuk pengisian kuisioner yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Afiah, Nunuy N. (2009). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Almilia, LS dan Irmaya Brilliantin. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah di Surabaya dan Sidoarjo*. Diakses dari spicaalmilia.files.wordpress.com/2007/03/artikel-penelitian-kinerja-sistem-informasi.pdf pada 20 Pebruari 2008 jam 10.30 WIB
- Baridwan, Zaki. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke-2. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, I, dan Gatot Soepriyanto. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Edisi I, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodnar, GH, dan William S Hopwood. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiyuwono, N. (1995). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indriantoro, N, dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Manajemen dan Akuntansi*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE
- Khotimah, (2003). Working paper tidak dipublikasikan.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-1. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Pemerintah RI, (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP No. 24. Jakarta: Salemba Empat
- Romney, M.B, dan PJ Steinbart (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 9, Buku I. Jakarta: Salemba Empat
- Setianingsih, S. dan Nur Indriantoro. (1999). *Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak dan Komunikasi Pemakai-Pengembang terhadap Hubungan Partisipasi dan Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi*. Vol. I No. 2. Yogyakarta: Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
- Singarimbun, M, dan Sofian Effendi. (1987). *Metodologi Penelitian Survai*. Cetakan ke-6. Jakarta: LP3ES
- Sunyoto, Danang. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Amara Books.